

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN ANGGARAN BELANJA TAHUN 2018-2021

**Anggi Safriani Harahap, Arnida Wahyuni Lubis**  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sumatera Utara  
 Email: [anggisafrianihrp@gmail.com](mailto:anggisafrianihrp@gmail.com), [armidawahyuni@yahoo.com](mailto:armidawahyuni@yahoo.com)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the Financial Performance of Local Governments at the Environmental Service of North Sumatera Utara. A case study of Employee Operational Expenditures by using independent Ratio analysis. Effectiveness Ratio of Local Revenue, Efficiency Ratio and Harmony Ratio. Based on the financial report of the Government of the Environment Office Analysis Techniques. The result of this study indicate that the financial performance of the North Sumatera Environmental Service Government is not optimal.*

**Keyword:** *Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Shopping Performance analysis*

### Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditetapkan bahwa APBD merupakan salah satu bentuk anggaran daerah. Pengelolaan keuangan ditetapkan setiap tahun, peraturan otonomi yang terdiri dari pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Belanja Daerah, semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancher, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran (Husein & Warandi, 2020)

Belanja operasional adalah biaya yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari yang memberikan manfaat jangka pendek. belanja operasional meliputi, belanja pegawai dan belanja barang/jasa.

Belanja pegawai adalah upah yang dibayarkan kepada pegawai dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat Negara, pegawai negeri sipil, pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Belanja Barang/Jasa adalah pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian barang/jasa dengan nilai yang dapat diterima kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah.

Analisis Kinerja Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara akan memberikan informasi penting, terutama di bidang pengelolaan keuangan, untuk pengambilan kebijakan dan untuk menilai apakah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara sudah mengelola keuangannya dengan baik dan berdampak positif terhadap kesejahteraan warga Negara. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara adalah analisis indeks Independen, indeks Kinerja, dan indeks Kepatuhan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian ini dengan mengangkat judul yaitu : **“Analisis Kinerja Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Anggaran Belanja Operasional Tahun 2018-2021”**. Dengan menelaah Kinerja Keuangan Pemerintahan, yang dapat diketahui hasil peristiwa dan kegiatan pemerintahan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

### Kajian Teori

#### Kinerja Keuangan

Menurut (Desanta Publisher, 2021) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-

aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

### Anggaran

(Radiks Purba, n.d.) menyatakan bahwa Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahap yang cukup

### Belanja Daerah

Belanja daerah menurut (Semarang, n.d.) bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kinerja belanja daerah berfokus pada interaksi strategis pemerintah daerah, yang telah memberikan landasan teori dan metode analisis untuk kegiatan pembelanjaan daerah.

### Metode Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian kuantitatif dimana menggambarkan fenomena yang sedang berlangsung pada waktu tertentu dengan menggunakan data yang didapat dari Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara. Sample dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data ini menggunakan metode dokumentasi dimana data tersebut di kumpulkan dengan menelusuri catatan- catatan dan dokumen- dokumen yang ada.

**Penelitian ini menggunakan analisis berupa rasio keuangan sebagai berikut:**

### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat} + \text{Pinjaman}}$$

(Halim, 2012 dalam Pramono, 2018) Ternyata kemandirian fisik daerah diwakili oleh penggunaan pendapatan asli daerah (PAD) relative terhadap sumber pendapatan daerah lainnya seperti subsidi pemerintah pusat dan pinjaman. Kemandirian daerah sebagian besar diwakili oleh kemandirian, dengan semakin tinggi indeks kemandirian daerah, semakin kecil ketergantungannya pada pendanaan eksternal.

Indeks kemandirian juga menentukan tingkat keteliban masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin besar derajat kemandirian maka semakin besar pula masyarakat dalam perpajakan dan pembagian wilayah yang merupakan komponen penting pendapatan bahan baku didaerah.

### Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Rasio efektivitas pendapatan kotor menentukan kemampuan daerah untuk mencapai proyeksi pendapatan kotor lingkungan relative terhadap tujuan yang ditentukan berdasarkan potensi daerah saat ini. Dikatakan pemerintahan daerah dapat memenuhi misinya, tetapi semakin tinggi efesiesnya, semakin baik operasi kerjanya. Menurut (Mahsun, 2016) adalah sebagai berikut :

Tabel Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Rasio Efektivitas
----------------------	-------------------

Tidak Efektif	<100%
Efektif Berimbang	=100%
Efektif	>100%

### Analisis Kinerja Belanja

Untuk mengetahui apa pemerintah daerah menggunakan APBD secara baik, dan efisien dan efektif. Perlu dilakukan analisis terhadap pengeluaran daerah (value for money). (Mahmudi, 2010) Menyatakan berdasarkan informasi pada laporan realisasi Anggaran, kita dapat membuat analisis anggaran khususnya analisis belanja antara lain yaitu:

#### 1. Analisis Varians Belanja

Analisis Varian merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran.

Realisasi pendapatan – Anggaran pendapatan

#### 2. Analisis Kecerahan Belanja

Analisis pengeluaran tentu dapat membantu keseimbangan pengeluaran. Ini tentang fungsi anggaran yang berjalan dengan baik.

#### 3. Rasio Efisiensi Belanja

Pengeluaran rasio efisiensi mengacu pada perbandingan pertandingan saat ini dan peraturan pengeluaran. Efektivitas biaya rasio ini digunakan untuk memantau status anggaran pemerintah. Rasio Belanja Modal

$$\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100 \%$$

Rasio Belanja Operasional

$$\frac{\text{Total Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Rasio ini menentukan sumber daya operasi atau biaya modal sebagai pemerintah daerah. Tidak ada standar yang jelas mengenai rasio pengeluaran modal kerja yang ideal untuk APBD karena sangat dipengaruhi oleh dinamika kegiatan pembangunan yang diperlukan untuk pertumbuhan pertumbuhan.

Jika tingkat efisiensi di bawah 100%, pemerintah daerah akan menilai seberapa efektif mereka telah menerapkan peraturan tersebut. Sebaliknya, jika lebih besar dari 100%, itu menunjukkan hilangnya aturan.

### Hasil dan Pembahasan

#### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan pemerintahan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.**  
**Rasio Kemandirian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara**  
**Tahun 2018-2021**

Periode	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Realisasi	Rasio Kemandirian (%)
2018	900.000.000,00	1.333.556.000,00	148,17 %
2019	1.333.556.000,00	1.763.553.000,00	132,24 %
2020	1.333.556.000,00	1.645.737.000,00	123,41 %
2021	1.800.000.000,00	1.405.933.000,00	78,11 %

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio kemandirian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan yaitu 78,11% ditahun 2021.

#### Rasio Efektivitas PAD

Hasil perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.**  
**Rasio Efektivitas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021**

Periode	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Efektivitas
2018	900.000.000,00	1.333.556.000,00	148,17 %
2019	1.333.556.000,00	1.763.553.000,00	132,24 %
2020	1.333.556.000,00	1.645.737.000,00	123,41 %
2021	1.800.000.000,00	1.405.933.000,00	78,11 %

Berdasarkan tabel diatas bisa diketahui bahwa rasio efektivitas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara ditahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 69,28% namun demikian, dapat disimpulkan bahwa pemda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara kurang efektif dalam mengelola pendapatan asli daerahnya sebab nilai rasio efektivitas memberikan angka lebih dari 100%.

#### Analisis Kinerja Belanja

Analisis Varians Belanja

**Tabel 3.**  
**Varians Belanja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara**

Periode	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	Varians/selisih (Rp)	Kinerja
2018	900.000.000,00	1.333.556.000,00	433.556.000,00	Baik
2019	1.333.556.000,00	1.763.533.000,00	429.997.000,00	Baik
2020	1.333.556.000,00	1.645.737.000,00	312.181.000,00	Baik
2021	1.800.000.000,00	1.405.933.000,00	394.067.000,00	Baik

**Tabel 4.**  
**Rasio Belanja Modal dan Belanja Operasional Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021**

Periode	Total Belanja (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Operasional (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)	Rasio Belanja Operasional (%)
2018	69.823.399.391,68	21.586.270.901,00	48.237.128.490,68	73,40	93,54
2019	69.264.838.322,00	12.316.772.820,00	56.948.065.502,00	88,26	90,35
2020	43.916.792.891,00	7.388.806.565,00	36.577.986.326,00	98,20	95,58
2021	39.699.236.198,00	2.964.751.125,00	36.734.485.073,00	86,14	87,45

Sumber data : DLH PROPSU

Berdasarkan data di atas untuk tahun 2018-2021, Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara menggunakan APBD untuk keperluan belanja operasional. Dari jumlah tersebut, Belanja Operasional 93,54% dari total anggaran 2018 dan belanja modal sebesar 73,40% dari total anggaran. Pada tahun 2019, Belanja Operasional 90,35% dari total anggaran dan belanja modal 88,26% dari total belanja modal. Kemudian pada tahun 2020 pemerintah daerah akan membelanjakan 95,58% dari total belanjanya untuk biaya operasional dan 98,20% untuk belanja modal. Pada tahun 2021, total belanja operasional akan mencapai 87,45% dari total APBD dan belanja modal 86,14% dari total APBD.

Secara keseluruhan, dari tahun 2018 hingga 2021, Pemerintah Daerah Badan Lingkungan Hidup Sumut membelanjakan rata-rata 91,73% anggarannya untuk belanja operasional dan sisanya 8,27% untuk belanja modal.

**Tabel 5.**  
**Rasio Efisiensi Belanja di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara**  
**Tahun 2018-2021**

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi
2018	900.000.000,00	1.333.556.000,00	148,17 %
2019	1.333.556.000,00	1.763.553.000,00	132,24 %
2020	1.333.556.000,00	1.645.737.000,00	123,41 %
2021	1.800.000.000,00	1.405.933.000,00	78,11 %

Sumber Data : data yang diolah

Berdasarkan tabel diatas bisa diketahui bahwa rasio efisiensi Dinas Lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 78,11% pada tahun 2021. Secara umum rasio efisiensi memberikan angka kurang dari 100% berarti bisa dikatakan bahwa Pemerintah Dinas Lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara pada mengelola Pendapatan asli daerahnya kurang efisien.

### Kesimpulan

sesuai analisis serta pembahasan data yang telah diuraikan pada atas, maka bisa ditarik konklusi menjadi berikut:

1. Kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara masih belum optimal.
2. Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara belum efisien dalam mengelolah PAD, hal ini terlihat dari hasil perhitungan rasio efisiensi sebesar 123,41% pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebesar 78,11%.
3. Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara masih belum berimbang dalam penggunaan dananya, karena sebagian besar APBD masih digunakan untuk biaya operasional, yaitu sebesar 90,35% pada tahun 2019, dan 95,58% pada tahun 2020. Proporsi belanja modal pada Juga Tinggi yaitu 85,94% pada tahun 2019, dan 98,20% pada tahun 2020.

4. Dilihat dari varian/selisih belanja daerah termasuk kategori baik, dilihat dari keserasian belanja disimpulkan bahwa pemerintah lebih banyak menggunakan anggaran belanja operasional.

#### **Saran**

Berdasarkan simpulan diatas disarankan kepada pemerintah Dinas Lingkungan Hidup provinsi Sumatera Utara untuk :

1. Memaksimalkan semua sumber pendapatan berupa pendapatan awal daerah, dana perimbangan dan pendapatan perundang-undangan lainnya dari daerah sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan jangka panjang dan pengelolaan pemerintahan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
2. Berusaha meningkatkan belanja rutin pemerintah daerah untuk belanja modal dan membuatlah lebih efisien dalam biaya operasional.

#### **Referensi**

- Desanta Publisher. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*. (2021). (n.p.): Desanta Publisher.
- Halim, 2012 dalam Pramono, 2014: 25. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2015. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, September*, 149–157.
- Husein, H., & Warandi, S. (2020). Implementasi Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 72–98.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*,.
- Mahsun. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013*. 1(1), 40–54.
- Radiks Purba, R. (n.d.). *Anggaran belandja perusahaan*. Indonesia: Rosadi.
- Semarang, P. D. K. D. T. I. (n.d.). *NAnggaran pendapatan dan belanja daerah pembangunan*. (1982). Indonesia: Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Semarang.o Title.